

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Karena di dalam diri manusia melekat hak kodrat yang merupakan anugerah oleh Tuhan berupa harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia, sehingga wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah maupun setiap orang sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Karenanya, tidak ada seorang pun dan kekuasaan apapun yang dapat mencabutnya. Hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang melekat dan dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia.¹ Sehingga kemudian diartikan bahwa melekatnya hak asasi manusia tidak hanya melekat pada manusia yang terlahir normal akan tetapi juga melekat pada manusia yang terlahir tidak normal atau yang biasa disebut cacat/ penyandang disabilitas.

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan memiliki pendidikan seseorang dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki, pendidikan berhak untuk dapat diakses oleh semua orang termasuk kaum disabilitas karena pada dasarnya kaum disabilitas memiliki hak dasar yang sama sebagai manusia.

¹ Asplund D. Knult (ed).2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta. Pusham UII. Hal.11

Salah satu contoh pentingnya pendidikan yaitu ketika seseorang mencari pekerjaan syarat utama untuk dapat diterima kerja yaitu orang tersebut harus memiliki pendidikan, dengan memiliki pendidikan masyarakat atau seseorang dapat berperan serta dan menunjang kemajuan bangsa dan negara serta dapat berpartisipasi aktif dalam meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik, memiliki pendidikan juga seseorang memiliki kualitas untuk ditawarkan dan bersaing di dunia kerja, serta untuk mencapai kesejahteraan dalam diri seseorang tersebut sehingga dapat menunjang pembangunan di segala sektor sesuai dengan peran dan status sosialnya di masyarakat. Sejahtera sendiri yaitu kondisi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya. Namun pada kenyataannya di masyarakat masih banyak anggota masyarakat yang seharusnya bersekolah tetapi tidak bisa bersekolah karena banyak faktor penyebabnya.

Penyandang disabilitas merupakan istilah penyebutan untuk setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara seleyaknya. Istilah penyandang cacat sering juga disebut Disabilitas. Disabilitas atau *Disability* berarti “Tidak Memiliki Kemampuan”, penggunaan istilah Disabilitas ini dianggap memandang rendah dan terkesan mendiskriminasi para penyandang disabilitas. Sehingga kemudian penggunaan istilah Disabilitas mengalami pergeseran

mejadi Difabel. Difabel (*Different Ability People*) yang berarti seseorang dengan kemampuan berbeda. Perubahan istilah ini diharapkan juga mampu memberikan sikap positif dengan mengubah cara berfikir masyarakat tentang penyandang cacat bahwa sesungguhnya antara penyandang disabilitas (difabel) dan bukan penyandang disabilitas (nondifabel) adalah sama. Sebagaimana dalam UUD RI tahun 1945 pasal 28A-28J yang merupakan jaminan atas Hak Asasi Manusia dan pasal 5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang disabilitas.

Pembukaan UUD RI tahun 1945 menyebutkan tujuan dari pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah "...untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...". Penegasan dari tujuan tersebut terdapat dalam pasal 28C ayat 1 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Dalam pasal 12 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan tentang hak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk mendapatkan pendidikan. Demikian pula pasal 6 undang-undang No 4 tahun 1997 tentang penyandang disabilitas menyebutkan penyandang disabilitas memiliki hak yang sama atas pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

Undang-undang tentang sistem pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 menyebutkan tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah untuk “...mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa...”

Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia dan merupakan suatu sarana yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak lain dan merupakan gerbang menuju keberhasilan.² Menurut Cooman bahwa hak atas pendidikan adalah hak yang memberdayakan (*empowerment right*) yang secara efektif memberikan pengaruh langsung bagi penikmatan dan pemenuhan hak-hak lainnya dan merupakan pemenuhan bagi jati diri dan kemertabatan manusia.³

Akan tetapi hak seperti yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945, Undang-undang HAM maupun Undang-undang No 4 Tahun 1997 khususnya dalam memperoleh pendidikan penyandang disabilitas atau yang kemudian disebut difabel, di Indonesia tidak memiliki kesempatan dan/atau perlakuan yang sama seperti yang dimiliki oleh seorang bukan nondifabel. Kesenjangan ini dapat dibuktikan dengan banyaknya difabel yang tidak diterima di sekolah ataupun kuliah karena keterbatasan fisiknya.

Misalnya kasus seseorang anak di Palangkaraya Kalimantan Tengah, yang bernama Dwi Juli lulusan sekolah dasar yang kemudian

² Ibid. Hal. 115.

³ Majda El Muhtaj.2009. Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Jakarta. Rajawali Pers.Hal.167.

ditolak masuk ke salah satu sekolah favorit menengah pertama karena salah satu tangannya cacat.⁴

Dwi Juli hanyalah anak yang tergolong penyandang disabilitas atau disabilitas, namun Dwi Juli memiliki kemampuan yang luar biasa bisa masuk di sekolah favorit di Palangkaraya akan tetapi utusan dari pihak SMPN 2 Palangkaraya meminta orang tua Dwi untuk menandatangani surat pengunduran diri anaknya. Seharusnya pihak sekolah memberikan kesempatan bagi Dwi dapat belajar dan tergabung dalam sekolah dan kehidupan komunitas umum. Keanekaragaman antar anak dihargai, dan diyakini bahwa keanekaragaman menguatkan kelas dan menawarkan semua kesempatan yang lebih besar untuk pembelajaran anak.

Kasus serupa juga terjadi kepada Tri Winantyo Nugroho yang harus rela mengarungkan niatnya untuk meneruskan sekolah di sekolah umum SD Negeri Kebondalem 2 Prambanan, Klaten. Pasalnya, pihak sekolah menyarankan dia untuk mencari sekolah luar biasa (SLB) yang sesuai dengan kondisi fisiknya. Kondisi fisik Nugroho mengalami cacat sejak lahir setelah proses kelahirannya dengan cara vakum, Nugroho masih bisa berjalan meski tidak normal.⁵

Ketika pihak sekolah menyarankan anak yang berkebutuhan khusus atau difabel untuk mencari SLB kemungkinan besar sangat mudah dan dapat diterima, akan tetapi pihak sekolah harus memikirkan lagi ketika anak yang berkebutuhan khusus atau difabel ketika ingin sekolah inklusif

⁴ Liputan6. Tindak Diterima Sekolah Karena Cacat.

<http://m.liputan6.com/news/read/144227/tidak-diterima-sekolah-karena-cacat>, diakses tanggal 6 Desember 2017

⁵ Archive. Kaki Cacat Seorang Anak Ditolak Sekolah Di SDN

Negeri. <http://archive.co.id/thread/16629551/>, diakses tanggal 6 Desember 2017

(sekolah umum/reguler) anak telah merasakan betapa besarnya perbedaan yang dirasakan ketika berada disekolah SLB dengan sekolah inklusi, anak juga mempunyai kemampuan yang sama dengan anak pada umum nya bukti nya anak berkebutuhan khusus bisa lulus ujian dan mempunyai tekad yang sangat luar biasa.

Kasus terbaru berkaitan dengan adanya larangan peserta difabel untuk mengikuti tes masuk perguruan tinggi SNMPTN Tahun 2014. Pasalnya syarat SNMPTN 2014 menyatakan bahwa seorang calon peserta SNMPTN 2014 diisyaratkan tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan dan tidak buta warna sebagian. Ketentuan kemudian dinilai sangat diskriminatif terhadap penyandang difabel dan hal ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Menurut survei atau pendataan penyandang disabilitas oleh Departemen Sosial adapun hasil survei yang di dapatkan di 24 provinsi tercatat ada sejumlah 1.235.320 penyandang disabilitas, yang terdiri dari penyandang disabilitas laki-laki 687.020 sedangkan penyandang disabilitas perempuan 548.300. hanya sebagai dari mereka yang berpendidikan tidak sekolah atau tidak tamat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 59,9 %, yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 28,1 %, demikianlah dapat dikatakan bahwa pada umumnya pendidikan penyandang disabilitas masih rendah menurut survei yang telah dilakukan. Lebih memperhatikan lagi, sebaran besar dari mereka yang tidak memiliki keterampilan sebanyak 1.099.007 penyandang disabilitas atau 89.

Penyandang disabilitas yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki keterampilan, mempersulit mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang, sekitar 921.036 atau 74,6% penyandang disabilitas yang tidak memiliki pekerjaan.⁶

Permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas tidak hanya pada pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas, tetapi juga pasca pendidikan menengah atas (Ulfah Fatmala Rizky, 2015). Secara formal, akses pendidikan nondiskriminatif bagi penyandang disabilitas sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi. Kebijakan ini memungkinkan penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan bersama dengan siswa umum, sesuai dengan kemampuan penyandang disabilitas, dengan diwujudkannnya PSLD UB diharapkan dapat memberikan bantuan bagi Disabilitas untuk memperoleh pendidikan. Dilandasi filosofi bahwa mahasiswa difabel memiliki hak yang sama dengan mereka yang non-difabel, PSLD bertujuan meminimalisir hambatan akademis dan sosial yang dialami mahasiswa difabel sehingga mereka mampu memiliki kesempatan dan tingkat partisipasi yang sama dengan mahasiswa lain.

Kota Malang sebagai pusat pendidikan Internasional dan juga sebagai pendidikan inklusif, dalam pencaanangan Kota Malang sebagai Kota Pendidikan Inklusif, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan

⁶ Menegpp. Penyandang disabilitas. www.menegpp.go.id, diakses tanggal 6 Desember 2017

Layanan Khusus Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Mujito, Rektor UMM Muhadjir Efendy, Wali Kota Malang Drs. Peni Suparto, M.AP, Sekkota Malang Shofwan, Kepala Didik Kota Malang beserta seluruh jajaran pendidikan mulai dari TK sederajat hingga Universitas.⁷

Sehubungan dengan masih terbatasnya akses perguruan tinggi di Indonesia bagi penyandang disabilitas, dan didukung dengan grand design kampus Universitas Brawijaya yang ramah bagi penyandang disabilitas, maka melalui SK Rektor Nomor: 135/SK12012 dibentuklah Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD). UB menjadi *pioneer* dalam memfasilitasi penyandang disabilitas di Indonesia. Mulai tahun akademik 2012/2013 sebanyak 15 orang difabel telah diterima di UB melalui jalur mandiri yang diberi nama Seleksi Penerimaan Khusus Penyandang Disabilitas (SPKPD), yang tersebar di berbagai fakultas, antara lain : FIB 7 orang, PTIIK 4 orang, FEB 2 orang, FIA 1 orang, serta FISIP 1 orang. Pada tahun akademik 2013-2014 diterima sebanyak 21 mahasiswa difabel baru, terdiri dari mahasiswa FIB 5 orang, FIA 4 orang, Fakultas Hukum 2 orang, FISIP 2 orang, FEB 1 orang, PTIIK 2 orang, dan Program Vokasi 5 orang.

Melalui seleksi ini, UB menyediakan kuota 25 kursi bagi penyandang difabel. Mereka mengikuti tahapan yang meliputi seleksi administratif dan tes wawancara yang dilakukan PSLD UB bekerjasama dengan panitia penerimaan mahasiswa baru.

⁷ <https://mediacenter.malangkota.go.id/2012/12/kota-malang-pelopor-pendidikan-inklusif/>, diakses tanggal 17 Januari 2018.

Universitas Brawijaya pun menjadi *pilot project* kampus ramah difabel bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan (LKP3) FIA UB, Pusat Kajian Kerjasama Selatan Selatan Universitas Brawijaya (PKKSS UB), dan Helen Keller International Indonesia, dengan tujuan untuk melakukan inisiasi kampus inklusif bagi penyandang disabilitas, serta menjadikan UB sebagai pelopor kampus inklusif di Indonesia.

PSLD Universitas Brawijaya pun menjadi *pilot project* kampus ramah difabel bekerja sama dengan :

1. Program Peduli

Program Peduli memiliki misi mewujudkan sebuah gerakan Inklusi Sosial yang mengajak masyarakat luas untuk bertindak setara-semartabat dalam kehidupan sehari-hari. Peduli ingin menciptakan seluruh elemen masyarakat agar mendapat perlakuan yang setara dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara, terlepas dari perbedaan apa pun.

Program Peduli memiliki sasaran kepada kelompok yang terpinggirkan, bekerja dengan masyarakat sipil sebagai aktor kunci untuk inklusi sosial. Mitra masyarakat sipil menerapkan strategi lokal untuk memperbaiki akses terhadap layanan pemerintah, mendorong peningkatan penerimaan sosial bagi kelompok yang terpinggirkan, serta berpartisipasi dalam proses masyarakat dan memperkuat kebijakan inklusi sosial di tingkat nasional dan subnasional.

Situs ini menyajikan potret inklusi sosial yang terjadi di Indonesia. Cerita tentang masyarakat dan pemerintah yang bekerja sama untuk mempromosikan kesetaraan dan martabat, berbagi kesempatan, meruntuhkan prasangka, dan mengembalikan martabat untuk Indonesia yang lebih baik.

2. British Council

Salah satu prioritas program kesenian *British Council* adalah kesenian disabilitas: menghubungkan suara-suara yang tidak terdengar untuk menggeser persepsi agar tercipta inklusi sosial melalui kegiatan seni.

British Council mengawali program kesenian disabilitas di Indonesia pada tahun 2016, dengan pertukaran pelaku seni disabilitas dari Inggris dan Indonesia. Sejak itu, *British Council* menampilkan beberapa karya seni dalam festival meliputi: karya digital virtual reality, film, dan tari.

3. Ayo Inklusif ! *Supporting youth with disabilities*

4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK menyelenggarakan rangkain pelatihan Literasi Keuangan bagi penyandang disabilitas di Jawa Timur. Rangkain kegiatan ini diadakan di tiga kota yaitu Surabaya, Mojokerto, dan Malang, dengan peserta setiap kota sekitar 50 orang. Para peserta yang kebanyakan berprofesi sebagai pemijat, penjahit guru les dan pedagang ini mendapatkan pelatihan mengenai perencanaan dan pengelolaan uang.

5. Australian Agency for International Development (AusAID).

Pemerintah Australia menyumbangkan Rp 2,5 miliar untuk pengembangan *pilot project* madrasah inklusi. *Pilot project* ini dilakukan di 5 daerah yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. Setiap daerah akan mendapatkan Rp 500 juta untuk pembinaan dan pendampingan 4 madrasah inklusi. Peluncuran dan konferensi ini merupakan kerjasama Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD), Pusat Studi Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat (PSP2M) Universitas Brawijaya (UB) bekerjasama dengan *Australian Agency for International Development* (AusAID). Pengembangan pendidikan ini dilakukan dengan pemberian pelatihan dari sumber-sumber tingkat nasional dan provinsi dan dilakukan pembinaan dalam praktek pendidikannya. Hal ini jadi strategi dalam memenuhi keragaman peserta didik dan pemenuhan hak asasi manusia untuk mengakses pendidikan yang layak.

Universitas Brawijaya mendeklarasikan diri sebagai kampus inklusif. Artinya, menerima semua orang termasuk penyandang disabilitas serta memberikan kuota penerimaan di saat kampus lain belum ada, dengan harapan kampus-kampus lain mengikuti jejaknya untuk menerima mahasiswa difabel. Adanya PSLD ini sangat menarik karena Ini adalah program pertama di perguruan tinggi yang ada di Tanah Air. Universitas Brawijaya bisa dikatakan sebagai 'surga' bagi para mahasiswa difabel yang ingin menempuh pendidikan sarjana karena telah mendirikan PSLD, Pasalnya, selain memberikan sarana dan prasarana yang baik, UB juga memberikan beasiswa untuk mahasiswa difabel.

Bahkan, pihak kampus memberikan perhatian khusus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus itu, yakni dengan memberikan pendampingan. Universitas Brawijaya membuat program khusus yakni *affirmative action* (kebijakan kesetaraan kelompok tertentu) dengan membuat jalur masuk khusus. Tujuannya, agar anak disabilitas bisa masuk dan berkompetisi dengan sesama penyandang disabilitas, jenis ujian yang dilakukan pun, disesuaikan dengan kebutuhan para penyandang disabilitas tersebut.

Berdasarkan adanya kenyataan tersebut diatas yang melatar belakangi peneliti untuk memilih judul : Peran Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya Dalam Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas Untuk Memperoleh Pendidikan Tinggi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat merumuskan masalah untuk menjadi pedoman dalam pembahasan penulisan proposal ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran PSLD dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya ?
2. Bagaimana upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya, khususnya dalam bidang pendidikan ?
3. Apa yang menjadi kendala dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dibuat tujuan penulisan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran PSLD dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas (Disabilitas) di Universitas Brawijaya.
2. Untuk mengetahui upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya
3. Untuk mengetahui kendala hak penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan diatas maka penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. kegunaan teoritis

kegunan teoritis ini diharapkan bisa menjadi acuan/refrensi bagi penelitian berikutnya dalam meneliti masalah yang mempunyai kesamaan tema dengan penelitian ini, serta dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan bagi pengembangan PLSD, dan menambah cawana baru dalam perlindungan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan

2. Kegunaan praktis

Diharapkan kegunaan praktis ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Efektifitas Pusat Studi dan Layanan Disabilitas terhadap penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini akan memfokuskan penelitian pada **“Peran Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Untuk**

Memperoleh Pendidikan Tinggi”, yaitu fokus pada program Strata Satu / Sarjana (S1), yang meliputi :

1. Profil perguruan tinggi
2. Peran PSLD dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas
3. Upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya khususnya dalam bidang pendidikan
4. Kendala dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pendidikan
5. Jumlah mahasiswa disabilitas di PSLD Universitas Brawijaya
6. Jumlah *volunteer* untuk mendampingi mahasiswa disabilitas

Sesuai pada rumusan masalah yang diajukan dalam proposal skripsi ini maka penelitian ini memfokuskan pada peran PSLD Universitas Brawijaya dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan tinggi.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan penelitian maka penelitian ini berguna bagi :

1. Bagi pemerintah

Sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan mengenai perlindungan hak penyandang cacat (Difabel) dalam memperoleh pendidikan.

2. Bagi para penyandang disabilitas (Difabel)

Sebagai bahan tambahan pengetahuan mengenai hak-hak mereka yang dilindungi khususnya dalam memperoleh pendidikan

3. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan refrensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan tema.

